

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gusti Ketut Astawa  
Jabatan : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arief Prasetyo Adi  
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2023

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



I Gusti Ketut Astawa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1.1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	117%
		1.2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	137.98%
		1.3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	125.45%
		1.4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	55%
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	2.1. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	75%
		2.2. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	70%
		2.3. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	26 Provinsi
		2.4. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	70%

<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 16.475.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 16.475.000.000,-</b>

Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

Jakarta, 3 Januari 2023

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

I Gusti Ketut Astawa